

Dr. Agus Purwo Wicaksono, MM., MA.



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK

Agreement Pertahanan Indonesia-Tiongkok



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK

Perdamaian dunia merupakan isu penting dalam upaya pencapaian keamanan dan ketentraman manusia dalam suatu negara. Pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia tersebut, telah melakukan penandatanganan piagam yang dilakukan oleh mayoritas negara anggota, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional, setiap negara perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain termasuk bidang pertahanan agar tujuan nasional dapat terpenuhi. Kerja sama pertahanan telah banyak dilakukan oleh hampir negara-negara di seluruh dunia. Berbagai bentuk kerja sama pertahanan secara multilateral telah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, seperti SEATO (South East Asia Treaty Organization), ANZUS (Australia, New Zeland, and United States), NATO (North Atlantic Treaty Organization), CENTO (Central Treaty Organization), atau dikenal dengan Pakta Baghdad, maupun Pakta Warsawa.

program kebijakan kegiatan KPIT yang di tanda tangani tahun 2007 telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Pemerintah telah berkomitmen dalam mengimplementasikan kegiatan KPIT melalui dua tindakan. Yaitu Pertama, telah dilakukan tindakan regulatif. Hal ini terbukti dengan telah dibuatnya aturan-aturan pelaksanaan kegiatan, seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standard operating procedures maupun prosedur tetap (protap). Kedua, telah dilakukan tindakan alokatif. Hal ini dikarenakan telah dilakukan penunjukan pejabat yang mengelola kegiatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Tiongkok. Pada tingkat Kemenhan, telah dilaksanakan secara fungsional oleh Direktorat Kerjasama Internasional. Pada tingkat Satuan telah ditunjuk berbagai pejabat yang terkait langsung dengan kegiatan, seperti dari Staf Operasi Mabes TNI dan Staf Operasi Satuan.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-577-5



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK AGREEMENT PERTAHANAN INDONESIA- TIONGKOK

Dr. Agus Purwo Wicaksono



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK AGREEMENT
PERTAHANAN INDONESIA-TIONGKOK**

Penulis : Dr. Agus Purwo Wicaksono

Desain Sampul : Satria Panji Pradana

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-577-5

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pertama tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiratNya, karena atas berkah dan ridhoNyalah saya dapat menyelesaikan buku ini secara baik.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Dengan secara tulus, penulis ingin mengutarakan rasa terimakasih secara khusus kepada istri tercinta beserta tiga anak tersayang yang selama ini telah merelakan waktu untuk mendorong, memberi semangat, dan mendampingi selama penulis menyelesaikan buku ini.

Besar harapan penulis agar buku ini dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan negara khususnya dalam meningkatkan kekuatan nasional Indonesia melalui kesiagaan militer. Melalui optimalisasi implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan negara, diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Meskipun Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan buku yang baik, namun harus diakui bahwa isi disertasi ini masih mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan. Dengan demikian, penulis sangat membutuhkan kritikan dan masukan dari berbagai pihak agar penulis bisa menghasilkan naskah akademis yang lebih baik dimasa mendatang.

Jakarta, Desember 2022

Agus Purwo Wicaksono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Kebijakan Kerjasama Pertahanan	1
B. Kontribusi Kebijakan.....	5
C. Fokus Efektivitas Kebijakan	8
BAB 2 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KERJASAMA PERTAHANAN.....	14
A. <i>Gap</i> Kebijakan Pertahanan.....	14
B. Implementasi Kebijakan	22
C. Hakikat Kerja Sama Pertahanan	25
D. Manfaat Kerja Sama Pertahanan.....	29
E. Kebijakan Kerjasama Pertahanan	35
F. Kesiagaan Militer.....	40
G. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Kebijakan Kerja Sama Pertahanan dan Kesiagaan Militer.....	46
BAB 3 KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA-TIONGKOK 2007.....	50
A. Kebijakan Kerja Sama Pertahanan Indonesia	50
B. Dinamika yang Mendasari Persetujuan KPIT 2007	59
BAB 4 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KPIT TAHUN 2007.....	95
A. Tindakan Regulatif.....	95
B. Tindakan Alokatif.....	106
C. Kegiatan Pertukaran Informasi Kelembagaan.....	111
D. Kegiatan Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan	123
E. Kegiatan Pertukaran Data Ilmiah dan Teknologi.....	129
F. Kegiatan Kerja Sama Bidang Industri Pertahanan	133
G. Kegiatan Latihan Militer Bersama	140
BAB 5 IMPLIKASI KEBIJAKAN KPIT TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA.....	150
A. Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu dan Satuan.....	150

B. Implikasi KPIT Terhadap Kesiagaan Militer	184
BAB 6 PERAN KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP IMPLEMENTASI KPIT DAN KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA	201
A. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Implementasi KPIT	201
B. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Kesiagaan Militer	223
BAB 7 PENUTUP.....	252
DAFTAR PUSTAKA	257
TENTANG PENULIS	273

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Stages of the Policy Process.....	23
Gambar 2. 2	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	25
Gambar 2. 3	Tahapan Manfaat Hasil Kerja Sama Pertahanan.....	43
Gambar 3. 1	Tindakan regulatif dan alokatif serta implementasinya melalui program atau kegiatan	58
Gambar 3. 2	Peta Wilayah Sengketa Kawasan Laut Tiongkok Selatan.....	64
Gambar 3. 3	Peta Nine Dash Line dan Wilayah ZEE Indonesia	66
Gambar 3. 4	Peta Ten Dash Line Tiongkok	67
Gambar 3. 5	Jangkauan persenjataan negara tetangga.....	71
Gambar 3. 6	Jangkauan persenjataan milik Indonesia	74
Gambar 5. 1	Persentase Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu Indikator Penguasaan Teknologi Militer.....	151
Gambar 5. 2	Persentase Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu Indikator Strategi Kepemimpinan Militer.....	156
Gambar 5. 3	Persentase Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu Indikator Kapasitas Personel Militer	162
Gambar 5. 4	Persentase Manfaat Kegiatan KPIT Bagi Kesiagaan Individu.....	168
Gambar 5. 5	Peran Masing-masing Indikator dalam Peningkatan Kesiagaan Individu	168
Gambar 5. 6	Persentase Penerapan Manfaat Hasil Kegiatan KPIT Indikator Penguasaan Teknologi Militer di Satuan	171
Gambar 5. 7	Persentase Penerapan Manfaat Hasil Kegiatan KPIT Indikator Strategi Kepemimpinan Militer di Satuan	176

Gambar 5. 8	Persentase Penerapan Manfaat Hasil Kegiatan KPIT Indikator Kapasitas Personel Militer di Satuan.....	179
Gambar 5. 9	Persentase Manfaat Kegiatan KPIT Terhadap Kesiagaan Satuan.....	183
Gambar 5. 10	Persentase Penerapan Hasil Kegiatan KPIT dapat Meningkatkan Kesiagaan Militer	186

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perbandingan Beban Tugas Prajurit dalam Pengamanan Wilayah dan Melindungi Warga Negara.....	7
Tabel 4. 1	Alokasi Anggaran Kerja sama Internasional Kemhan	109
Tabel 4. 2	Jumlah Pertemuan Pejabat Kemhan RI dan Tiongkok.....	112
Tabel 4. 3	Jenis Diklat Bidang Pertahanan yang diikuti oleh Personil Indonesia.....	124
Tabel 4. 4	Kegiatan Rapat, Sidang dan Seminar Pertahanan dengan Tiongkok	130
Tabel 4. 5	Defence Industry Cooperation Meeting (DICM) Indonesia-Tiongkok	136
Tabel 4. 6	Kegiatan Latihan Militer Bersama TNI-PLA.....	141
Tabel 5. 1	Persentase Penerapan dan Tingkat Implikasi Kegiatan KPIT Terhadap Kesiagaan Satuan	184
Tabel 5. 2	Persentase Penerapan dan Tingkat Implikasi Kegiatan KPIT Terhadap Kesiagaan Militer	199
Tabel 6. 1	Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Kesiagaan Militer.....	249

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Kerjasama Pertahanan

Perdamaian dunia merupakan isu penting dalam upaya pencapaian keamanan dan ketentraman manusia dalam suatu negara. Pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia tersebut, telah melakukan penandatanganan piagam yang dilakukan oleh mayoritas negara anggota, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan. Stabilitas, baik di kawasan atau wilayah tertentu maupun internasional atau seluruh dunia, merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di dunia maupun di kawasan tersebut.

Salah satu elemen yang turut berpengaruh terhadap berbagai upaya perdamaian dan stabilitas baik kawasan maupun internasional yaitu kemampuan suatu bangsa atau kekuatan secara nasional dalam memanfaatkan segala aspek sumberdaya yang dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional, setiap negara perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain termasuk bidang pertahanan agar tujuan nasional dapat terpenuhi.

Kerja sama pertahanan telah banyak dilakukan oleh hampir negara-negara di seluruh dunia. Berbagai bentuk kerja sama pertahanan secara multilateral telah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, seperti SEATO (*South East Asia Treaty Organization*), ANZUS (*Australia, New Zeland, and United States*), NATO (*North Atlantic Treaty Organization*),

BAB 2

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KERJASAMA PERTAHANAN

A. *Gap* Kebijakan Pertahanan

Pembahasan untuk menganalisis implikasi kebijakan KPIT perlu dilakukan secara komprehensif, agar hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi yang mendekati sebenarnya. Untuk itu, maka diperlukan tinjauan pustaka sebagai landasan agar pemecahan masalah dan rekomendasi yang dihasilkan bisa diaplikasikan dengan tepat. *Review* penelitian sebelumnya dilakukan agar peneliti dapat melihat sebuah *gap* peta penelitian yang dilakukan. Sangat banyak para peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian dalam kebijakan kerja sama pertahanan. Meski demikian, peneliti mencoba memberikan analisis terhadap hasil penelitian yang benar-benar sangat terkait dengan penelitian ini.

Seperti halnya Riqiang (2011), yang telah melakukan penelitian tentang *Global Missile Defense Cooperation and Tiongkok*. Dalam penelitiannya, Riqiang bertujuan untuk menganalisis kerja sama pertahanan rudal balistik (*Ballistic Missile Defense, BMD*) antara AS-Rusia dan dampaknya terhadap keamanan strategis Tiongkok. Riqiang (2011) membahas kerja sama BMD AS-Rusia, diikuti dengan diskusi dari kemungkinan kerja sama Tiongkok-AS dan analisis potensi biaya dan manfaat. Selanjutnya, Riqiang (2011) menganalisis kerja sama BMD antara Amerika Serikat dan sekutu Asia dan dampak potensinya terhadap Tiongkok. Indikator dan variabel yang digunakan yaitu hubungan AS dengan sekutunya di Eropa dan Asia serta analisis negara-negara tertentu sebagai ancaman seperti

BAB 3

KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA-TIONGKOK 2007

A. Kebijakan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Melaksanakan kerja sama pertahanan, pada dasarnya bertujuan untuk terpenuhinya tujuan dan kepentingan nasional, khususnya bidang pertahanan, stabilitas kawasan, dan perdamaian dunia. Hal ini sebagaimana disampaikan Swastanto (2015:3), bahwa:

“ kerja sama pertahanan, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral memiliki tujuan untuk memastikan tercapainya tujuan pertahanan dan terpenuhinya kepentingan nasional, memenuhi kebutuhan pembangunan kemampuan pertahanan, bersama-sama mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan dan memberikan kontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional.”

Kerja sama pertahanan dengan negara lain merupakan bagian dari hubungan luar negeri Indonesia yang diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 8 Januari 2002 tentang hubungan luar negeri pasal 5 ayat 1 bahwa “hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.” Kewenangan penyelenggaraan kerja sama pertahanan, berada di tangan Presiden. Namun demikian, Presiden dapat menunjuk pejabat bidang pertahanan untuk menyelenggarakan Kerja sama bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 1999 pasal 7 ayat 1 bahwa

BAB

4

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KPIT TAHUN 2007

A. Tindakan Regulatif

1. Aturan Pelaksanaan

Sebagaimana yang disampaikan Dunn (2003:514) bahwa tindakan regulatif yaitu tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu seperti Badan Pengendali atau Badan Pengawas. Disini nampak betapa pentingnya keberadaan standar atau prosedur yang harus dipatuhi agar tindakan kebijakan menjadi efektif. Dengan demikian, untuk melaksanakan setiap kegiatan, agar keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan, diperlukan aturan dalam bentuk prosedur pada proses pelaksanaannya.

Standar atau prosedur yang digunakan sebagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama pertahanan Indonesia Tiongkok telah dibuat dengan baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan semuanya didukung dengan aturan pelaksanaan yang memadai. Kondisi ini didasarkan hasil wawancara dengan para informan yang menyatakan bahwa telah ada aturan pelaksanaan dalam kegiatan kerja sama dengan Tiongkok. Secara garis besar, aturan pelaksanaan tersebut ada yang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Aturan pelaksanaan dalam bentuk tertulis, ada beberapa macam yaitu pertama, bentuk kebijakan yang merupakan aturan bidang kerja sama pertahanan untuk tingkat nasional, yang ditetapkan melalui keputusan menteri

BAB 5

IMPLIKASI KEBIJAKAN KPIT TERHADAP KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA

A. Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu dan Satuan

1. Manfaat KPIT Bagi Kesiagaan Individu

Manfaat hasil kerja sama Pertahanan dengan Tiongkok terhadap kesiagaan militer Indonesia dicapai melalui beberapa tahap sebagaimana disampaikan Cole dan Parston (2006:21). Pertama, kesiagaan individu atau manfaat yang diterima secara individu pelaku sebagai *initial outcomes*, yang merupakan manfaat awal bagi para pelaku kegiatan KPIT. Kedua, kesiagaan satuan atau manfaat yang diterima satuan sebagai *intermediate outcomes*, merupakan manfaat jangka menengah yang diterima TNI. Ketiga, kesiagaan militer atau manfaat yang diterima TNI secara institusi sebagai *long-term outcomes*, merupakan manfaat jangka panjang yang diterima militer Indonesia secara keseluruhan.

Manfaat KPIT bagi kesiagaan individu, dianalisis berdasarkan persepsi para responden setelah mengikuti kegiatan kerja sama dengan Tiongkok dan pernyataan para pelaksana serta para pakar baik melalui wawancara maupun FGD. Sesuai yang disampaikan Morgenthau (2010:157), analisis dilakukan terhadap indikator penguasaan teknologi alutsista, strategi kepemimpinan militer dan kapasitas personel militer. Oleh karena KPIT diimplementasikan dalam lima kegiatan, maka analisis dilakukan terhadap setiap indikator terkait kegiatan yang dilaksanakan.

Pertama, manfaat KPIT bagi kesiagaan individu indikator penguasaan teknologi militer dilakukan analisis

BAB 6

PERAN KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP IMPLEMENTASI KPIT DAN KESIAGAAN MILITER DI INDONESIA

A. Peran Kondisi Lingkungan Terhadap Implementasi KPIT

1. Peran Elite Politik Terhadap Implementasi KPIT

Peran kondisi lingkungan terhadap implementasi KPIT dan kesiagaan militer di Indonesia dianalisis terhadap keseluruhan indikator yang terkait dengan ke tiga variabel. Kesiagaan militer dilakukan analisis terhadap penguasaan teknologi alutsista, strategi kepemimpinan militer dan kapasitas personel militer. Implementasi KPIT dianalisis berdasarkan macam kegiatan yang dilaksanakan sesuai naskah persetujuan (2007), yaitu pertukaran informasi kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi data ilmiah dan teknologi, kerjasama industri pertahanan, dan kegiatan latihan militer bersama.

Sebagaimana van Meter dan van Horn (1975:471), analisis kondisi lingkungan dilakukan terhadap peran dan dukungan yang diberikan oleh para elite politik terhadap peran dan dukungan pimpinan satuan, terhadap peran dan dukungan anggaran, serta terhadap peran dan dukungan dari para partisipan baik pelaku maupun pengelola kegiatan. Dengan demikian, analisis akan dilakukan terhadap ke empat kondisi lingkungan tersebut berkaitan dengan perannya dalam implementasi kegiatan KPIT dan peningkatan kesiagaan militer di Indonesia.

Pertama, analisis dilakukan terhadap peran dan dukungan yang diberikan para elite politik terhadap kegiatan pertukaran informasi kelembagaan dalam pelaksanaan KPIT

BAB

7

PENUTUP

Kesimpulan *pertama*, program kebijakan kegiatan KPIT yang di tanda tangani tahun 2007 telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Pemerintah telah berkomitmen dalam mengimplementasikan kegiatan KPIT melalui dua tindakan. Pertama, telah dilakukan tindakan regulatif. Hal ini terbukti dengan telah dibuatnya aturan-aturan pelaksanaan kegiatan, seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *standard operating procedures* maupun prosedur tetap (protap). Aturan-aturan yang ada tersebut telah disosialisasikan dengan baik kepada seluruh personel yang terkait, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pelaku kegiatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Tiongkok. Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pengendalian secara baik, untuk disesuaikan dengan aturan yang ada. Para pejabat yang terkait dengan kegiatan, dipastikan telah melakukan pengontrolan dan pengawasan dengan baik, seperti dari Kemhan, Mabes TNI, Pejabat Satuan sampai Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kedua, telah dilakukan tindakan alokatif. Hal ini dikarenakan telah dilakukan penunjukan pejabat yang mengelola kegiatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Tiongkok. Pada tingkat Kemenhan, telah dilaksanakan secara fungsional oleh Direktorat Kerjasama Internasional. Pada tingkat Satuan telah ditunjuk berbagai pejabat yang terkait langsung dengan kegiatan, seperti dari Staf Operasi Mabes TNI dan Staf Operasi Satuan. Selanjutnya, telah dilakukan penyusunan program dan anggaran dengan baik melalui APBN. Program yang akan dilaksanakan telah disusun berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tanggal 8 Januari 2002 Tentang Pertahanan Negara
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang TNI
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tanggal 8 Januari 2002 Tentang Hubungan Luar Negeri
- _____, 2007, *Kerjasama Budaya Indonesia-Tiongkok*. 2007, (internet) <<http://id.inti.or.id/specialnews/25/tahun/2007/bulan/06/tanggal/02/id/258/print/>>. (Diakses tanggal 10 Maret 2013).
- _____, 2008, *Kontrak LNG Dievaluasi*. (Internet) <<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/24/01403476>>, (Diakses tanggal 30 April 2013)
- _____, 2008, Xinhua News Agency, "*Senior CPC Leader Vows to Enhance Cooperation with Indonesia*."
- _____, 2009, Official Website China Radio International (CRI). "*Catatan Penting Dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia*", (Internet) <<http://indonesian.cri.cn/481/2009/09/30/1s102390.html>> (Diakses pada 28 September 2013)
- _____, 2013, *Biografi Presiden Soeharto-Bapak Pembangunan Indonesia*. 2013, (Internet) <<http://www.biografitokoh.com/2013/02/biografipresiden-soeharto-bapak.html>> (Diakses tanggal 30 September 2013)
- _____, 2013, *Indonesia-China Tanda Tangani Pernyataan Bersama Budaya*". 2013, (internet) <[Error! Hyperlink reference not valid](#)>.-china-tanda-tangani-pernyataan-bersama-budaya>(Diakses tanggal 20 Januari 2013)
- _____, "*Pecinan*" dalam (Internet) <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/budaya_bangsa/Pecinan/Kota.html>. (Diakses tanggal 23 Jan 2015)

- _____<http://:bataviase.co.id/node/255445>. Diakses tanggal 19 Maret 2011, pukul 21.05 wib.
- Adriansyah, E., 2005, *Pasang Surut Hubungan RI-RRC*, (Internet) <<http://osdir.com/ml/culture.region.china.budayationghoa/2005-09/msg.html>> (Diakses tanggal 30 Mei 2013).
- Albrecht, P., dan Barnes, K., 2008, National Security Policy-Making and Gender. *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW*. Terjemahan, Catherine Muir, Pembuatan Kebijakan Keamanan Nasional dan Gender. Diterbitkan oleh IDSPS atas nama DCAF
- Ali, A.H., 2012, *Indonesia Dari Perspektif Kepentingan China: Suatu Tinjauan*. <Http://Www.Fkpmaritim.Org/Indonesia-Dari-Perspektif-Kepentingan-China-Suatu-Tinjauan/> \Diakses 24 Nov 2014
- Altes, F.K., 2012, European Defence Cooperation. *European Defence Cooperation Sovereignty And The Capacity To Act* No. 78, January 2012.
- Andrea, F., 2011, "Tantangan ASEAN dan Masalah Konflik Laut China Selatan". *Analisis CSIS* Vol. 40. No. 3 September 2011.
- Antara, *RI-China Rampungkan Kesepakatan Kerjasama Pertahanan*. <http://www.antara.co.id>. Jakarta, 9 April 2007.
- Antariksa, Y., 2013, Antara Netralitas Dan Kepentingan Nasional Indonesia Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan* Desember 2013, Volume 3, Nomor 3
- Anwar, R., 2013, *Hubungan Pertahanan China dan Indonesia*, (internet) <<http://hankam.kompasiana.com/2013/10/18/hubungan-pertahanan-china-dan-indonesia-602603.html>> (Diakses tanggal 30 Oktober 2013)
- Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing. <http://www.antaranews.com/berita/309574/indonesia-kaji-sistem-industri-pertahanan-elektronika-dengan-China>

- Athan Beijing, 2007, *Laporan Pelaksanaan Kunjungan Menhan RI ke China*. Athan Kedubes RI Beijing, 10 November 2007
- Babbie, E., 2005, *The Basic of Sosial Research*. Third Edition. Champman University. Thomson Wadsworth. Belmont-USA
- Babbie, E., 2010, *The Practice of Sosial Research*. Twelfth Edition. Champman University. Thomson Wadsworth. Belmont-USA
- Bais TNI., 2007, *Hubungan Bilateral RI-RRT dalam Pertahanan Keamanan*. Jakarta
- Bappenas RI, 2008, RPJMN 2009-2014
- Bappenas RI, 2012, Rencana Kerja Pemerintah TA 2013
- Bappennas RI, 2004, RPJP 2005-2025
- Berita Negara Republik Indonesia No.227, 2009, *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan*. Kemenhan RI. Jakarta
- Biro Hukum Dephan RI, 2007, *Laporan Pelaksanaan Rapat Interdept Counter Draft MoU Kerjasama RI-China dalam Bidang Pertahanan*. Jakarta, 30 Januari 2007.
- Biro Hukum Dephan RI, 2007, *Laporan Pelaksanaan Rapat Kerjasama RI-China*. Jakarta, 20 Juni 2007.
- Biro Hukum Dephan RI., 2007, *Kronologis RI-China*. Jakarta
- Biro Hukum Dephan RI., 2007, *Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembahasan Counter Draft Agreement RI-China di bidang Pertahanan*. Jakarta, 19 April 2007.
- Bramantya, E., Niko, I., Juanda, Y.R., Bhakti, Y.P., Marpaung, S.M., 2014, *Korupsi dan Partai Politik di Indonesia*. Fisipol Undip. Semarang.
- Budiwati, N., 2007, *Analisis Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi*. UPI Bandung.
http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_EKONOMI_DAN_KOPERASI/196302211987032-

[NETI_BUDIWATI/Analisis_Inflasi_%26_Pertumbuhan_Ekonomi.pdf](#) (Diakses 9 Agustus 2015)

- China Oupstost, 2011, *Sengketa Kepulauan Spratly: Tantangan Bagi Indonesia*. Diunduh dari <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/472-sengketa-kepulauan-spratly-tantangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011>. Diakses pada tanggal 19 April 2013.
- Cochran, C.E., Mayer, L.C., T.R. Carr and Cayer, N.J., 2009, *American Public Policy: An Introduction*, Ninth Edition. Wadsworth Cengage Learning 25 Thomson Place Boston, MA 02210 USA
- Cole, M., and Parston, G., 2006, *Unlocking Public Value : A New Model For Achieving High Performance In Public Service Organizations*. New Jersey. John Wiley & Sons Inc.
- Cornejo, R., 2000, Riset jurnal "Nonproliferation Review", (Internet) <<http://log.viva.co.id/news/read/1912>> (diakses pada 10 September 2013)
- Creswell, J.W., 2013, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Third Edition. Terjemahan SAGE. Cetakan I, 2014. Jakarta
- Creswell, JH., *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. Second Edition.
- Dake, A., 1973. *In the Spirit of the Red Banteng*, (Internet) <<http://log.viva.co.id/news/read/1912>> (diakses pada 10 September 2013)
- Das, R.N., 2010, "India-China Defence Cooperation and Military Engagement". *Journal of Defence Studies* Vol 4. No 4. October 2010
- Demartini, A., 2010, "One Way to Make Sense of Policy Implementation, Analysis of the Van Meter/Van Horn Model," PA: 715 - *Policy Making & Implementation*. Graded Assignment #2. October 8, 2010.

- Denzin, N.K., dan Lincoln, Y.S., 2009, *Handbook of Qualitative Research*. Terjemahan oleh Dariyatno dkk. Cetakan I. Yogyakarta.
- Dephan RI, 2013, *Indonesia-China Perluas Bentuk Latihan Militer Bersama*, (internet)
 <<http://www.indonesia.go.id/in/kementerian-pertahanan/2281-pertahanan-dankeamanan/12128-indonesia-china-perluas-bentuklatihan-militer-bersama>>
 (Diakses tanggal 30 Oktober 2013)
- Dewitri, 2009, *Dilema Keamanan Asean Dalam Konflik Laut Cina Selatan*. (Internet)
 <<https://dewitri.wordpress.com/2009/01/03/dilema-keamanan-asean-dalam-konflik-laut-cina-selatan/>> (Diakses 23 Jan 2014)
- Diehl, L.R. and Diehl, P.L., 1992, *Research Methods for Business and Management*. New York: Macmillan Publ. Company.
- Ditjen Strahan Kemhan RI, 2013, *Implikasi Konflik Laut China Selatan Terhadap Netralitas dan Sentralisas ASEAN*. Jakarta.
- Ditjen Strahan Kemhan, 2013, *Kaji Ulang Keamanan Strategis*. Jakarta.
- Djafar, Z., 2008, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Drent, M., Zandee, D., Casteleijn, L., 2014, *Defence Cooperation in Clusters: Identifying the Next Steps*. Clingendael report.
- Dunn, W.N., 1994, *Publik Policy Analysis: An Introduction*. Dialihbahasakan oleh Samodra Wibawa, dkk., 2003. Cetakan Kelima. Jogjakarta.
- Dutta, A., 2009, *Role of India's Defence Cooperation Initiatives in Meeting the Foreign Policy Goals*, Focus Vol 3. No 3. July 2009, Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.
- Effendi, T., 2008, *Hubungan Bilateral Indonesia – Republik Rakyat China*, (Internet)

<<http://tonnyeffendi.wordpress.com/2008/08/11/hubungan-bilateral-indonesia-republik-rakyat-china/>> (Diakses 23 Jan 2015)

Estyngtias, 2013. *“Imperialisme AS di alik Topeng APEC – dikutip dari pernyataan Laksamana Samuel J. Locklear III Panglima Komando Militer AS di Kawasan Pasifik”*, (Internet) <<http://hizbuttahrir.or.id/2013/10/13/imperialisme-as-di-baliktopeng-apec/>> (Diakses tanggal 27 Oktober 2013)

Finkelstein, D., 2010, *“The Military Dimensions of U.S.–China Security Cooperation: Retrospective and Future Prospects”*. *Center for Naval Analysis*.

Gate, R.M., 2008, *National Defence Strategy*, Departement of Defence of US.

Gompert, D.C., dan Saunders, P.C., 2011, *The Paradox of Power: Sino Strategic Restraint in an Age of Vulnerability*, Washington DC.: Center For The Study of Chinese Military Affairs. Institute For National Strategies Studies. National Defense University Press.

Harini, S., 2011, *Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan*. Vol 14 No. 21 Th 2011 (Internet) <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/214> (Diunduh 6 Jan 2016)

Hartati, I., 2013, Implementasi kerjasama pertahanan keamanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam kerangka prolifiration security initiative (PSI) 2009. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*.

Hays, P.L., Vallance, B.J., Van Tassel, A.R., 1997, *American Defense Policy*, Seventh Edition, The John Hopkins Press, Baltimore and London

Henderson, JB., 2003, *Redefining the Military Element of National Power*. U.S. Army War College. Pennsylvania

Hikam, M.A.S, 2014, *Menyongsong 2014-2019: Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*, Jakarta: Rumah Buku

Holsti, K.J., 1983, "International Politics: A Framework for Analysis", Fourth Edition. Terjemahan oleh Azhary, M.T., 1998, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga. Jakarta.

Howlett, Michael and Ramesh, M., 1995, *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University. Toronto and Newyork.

<http://dilihatya.com/2411/pengertian-implikasi-menurut-para-ahli>. Diakses 18 Februari 2015

<http://indomiliter.com/2014/08/11/imbas-konflik-laut-cina-selatan-pacu-modernisasi-kekuatan-laut-di-asia-tenggara/>
Diakses 23 Jan 2015

<http://militerindonesiamy.blogspot.com/2014/07/indonesia-berharap-negara-lain-hormati.html>. Diakses 21 Nov 2014

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/438028-moeldoko-keluhkan-minimnya-jumlah-anggota-tni> Diakses 11 Juni 2014

<http://politik.lipi.go.id/kolom/keamanan/475-problematika-industri-pertahanan-indonesia.html> diunduh pada 12 September 2013

<http://www.antaraneews.com/berita/449923/pesawat-tempur-tiongkok-terbang-dekat-jet-militer-as>. Diakses 28 Nov 2014

<http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=137> Diakses 11 Jan 2015

<http://www.pab-indonesia.com/berita/tajuk-rencana/7688-ambalat-dan-kelemahan-pertahanan.html> diunduh pada 12 September 2013

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/09/23/ncc6xm-China-komitmen-dukung-modernisasi-persenjataan-tni>. Diakses 15 Nov 2014

http://www.seasite.niu.edu/indonesian/budaya_bangsa/Pecinan/Kota.html>. (Diakses tanggal 23 Jan 2015)

<http://www.tni.mil.id/view-24018-pangarmabar+mengunjungi+kapal+perang+china.html>.

Diakses 16 Nov 2014

<http://www.tni.mil.id/view-8505-menteri-pertahanan-rrc-berkunjung-ke-kopassus.html> Diakses 10 Jan 2015

<https://groups.yahoo.com/neo/groups/nasional-list/conversations/topics/142134>. Diakses 16 Nov 2014

Ibad, M.N. dan Fikri, Akhmad AF. 2012. "*Bapak Tiongkok Indonesia*". Yogyakarta : LkiS, (Internet) <<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detailids>>, (Diakses tanggal 28 September 2012)

Istu, 2015, Implikasi Kebijakan Kerjasama Pertahanan Guna Meningkatkan Kesiapsiagaan Militer Dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Makalah FGD* di Jakarta, 26 Februari 2015.

Kaplan, R.D., 2011, "The South China Sea is The future of Conflict", dalam *Foreign Policy* September/Oktober 2011.

KBRI Beijing. : *Hubungan Indonesia-China Bidang Pertahanan dan Keamanan*. [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

KBRI Beijing. : *Penyelenggaraan Workshop bertajuk "Memberi Arti Lebih Bagi Kemitraan Strategis RI-RRT: Peluang dan Tantangan"*. Beijing, 26 Oktober 2007. <http://www.indonesianembassy-china.org>.

Kemenhan RI., 2006, *Indonesia dan China Menjajaki Kerjasama Bidang Pertahanan dan Keamanan*. DMC. Jakarta, 12 Mei 2006.

Kemenlu, 2010, *Diplomasi Indonesia*. Kemenlu. Jakarta

Kemhan RI, 2008, *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta.

Kemhan RI, 2008-2013, *Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Direktorat Kerjasama Internasional TA 2008-2013*

Kemhan RI, 2012-2013, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) TA. 2012 dan 2013*.

- Kemhan RI, 2014, *Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/25/M/I/2014 Tanggal : 7 Januari 2014 tentang Kebijakan Pertahanan Tahun 2014.*
- Kemhan RI, 2014, *Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran TW III TA. 2014*
- Kemhan RI, 2014, *Memperkokoh Persaudaraan Dua Bangsa : Sewindu Kerjasama Pertahanan Indonesia-Tiongkok.* Pusat Komunikasi Publik Kemhan RI. Cetakan Pertama. Jakarta
- Keppres Nomor 12 Tahun 2014 Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Penggantian Istilah China Menjadi Tiongkok.
- Kurnia, E., 2014, *Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia.* Universitas Pertahanan. Jakarta
- Kurniawan, Y., 2003, mengutip dari Amitav Acharya, , "Seeking Security in Dragon's Shadow: China and Southeast Asia in The Emerging Asian Order", *Working Paper No. 44, Singapore: Institute Defence and Security Studies, 2003.*
- Kurniawan, Y., 2011, *Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan.* Dipresentasikan pada Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) II, Bandung.
- Lubis, F., 2014, *Siaga Konflik Laut China Selatan, TNI Perkuat Pulau Terluar* (Internet) <<http://news.liputan6.com/read/2030094/siaga-konflik-laut-china-selatan-tni-perkuat-pulau-terluar>>. (Diakses 6 Jan 2016)
- Mabes TNI, 2012, *Evaluasi Implementasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Di Lingkungan TNI.* Staf Perencanaan Umum Mabes TNI. Jakarta
- Mas'oe'd, M., 1990, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi.* Yogyakarta.

- Mas' oed, M., 1990, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Pusat Antar Universitas-Studi Sosial UGM, Yogyakarta.
- Molan, A.J., 1997, "The Australian-Indonesian Defence Relationship". *Australian College of Defence and Strategic Studies*. Canberra.
- Morgenthau, H.J. dan Thompson, K.W., 2010, *Politik Antar Bangsa*, terjemahan S. Maimoen, dkk, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin, Y.A., 2006, *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Muhammad, S.V., 2014, "Peningkatan Kekuatan Militer Di Kawasan Dan Peran Asean Regional Forum". *Info Singkat*. Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014. (Internet) <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-7.pdf>, (Diakses tanggal 17 Juli 2015)
- Multazam, A., 2010, *Diplomasi Pertahanan Yang Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Korea Selatan*. Fisip UI Press. Jakarta
- Munggaran, A.S., Asri, R.P., Alfajri, R., 2013, *Gerakan Separatis Sebagai Tantangan bagi Diplomasi Indonesia di Era Paradox of Plenty*. Unpad. Bandung.
- Muthanna, K.A., 2006, "International Defence And Military Cooperation". *Air Power Journal* Vol. 3 No. 1 Spring 2006. Indian Army. New Delhi.
- Muthanna, K.A., 2011, "Military Diplomacy". *Journal of Defence Studies*. Vol 5 No. 1 January 2011. Indian Army. New Delhi.
- Nayudu, SK., 2011, *Preventive Diplomacy, Defence Cooperation & the Pursuit of Cooperative Security: The Indian Experience*. Focus Vol 5. No 1. January 2011.

- Novana, R.F., 2012, *Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009*.
- Nugroho, R., 2008, *Publik Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, R., 2012, *Publik Policy*. Elex Media Komputindo. Edisi Keempat. Jakarta.
- Parsons, W., 2005, *Publik Policy*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/03/M/II/2008 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.
- Perpres No. 41 Tahun 2010 Kebijakan Umum Pertahanan 2010-2014 Tanggal 17 Juni 2010
- Perpres Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
- Planifolia, V., 2015, *Rebalancing Strategic Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik*. (Internet)
<https://www.academia.edu/12073957/Rebalancing_Strategic_Amerika_Serikat_di_Kawasan_Asia-Pasifik> (Diakses 2 Agustus 2015)
- Priyambodo, RH., 2010, *VP receives two Chinese astronauts*, (internet) <[Error! Hyperlink reference not valid. antaraneews.com/en/news/2010](http://www.antaraneews.com/en/news/2010)>, diakses tanggal 10 Januari 2014
- Purwanto, E.A. dan Sulistyastuti, D.R., 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.
- Rachmayanti, N., 2014, *Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)*. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

- Rahmayeni, I., 2014, Kebijakan China Melakukan Kerjasama Energi Minyak dengan Sudan (2009-2012). *JOM Fisip* Volume 1 no. 2- Oktober 2014
- Rini, E.S., 2010. "Mendag Tiongkok Datang, Ini Isu Yang Dibahas" (Internet)
 <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/140925-mendag_tiongkok_datang_ini_isu_yang_dibahas>, (Diakses tanggal 1 Oktober 2013)
- Riqiang, W., 2011, "Global Missile Defense Cooperation and China". *Asian Perspective* Vol. 35.
- Roza, R., Nainggolan, P.P., dan Muhamad, S.V., 2013, *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia. Jakarta
- RPJMN 2009-2014 Buku I, II dan III
- RPJMN 2015-2019 Buku I, II dan III
- RPJPN 2005-2025
- Rubinstein, G.A., 2007, "US-Japan Missile Defense Cooperation: Current Status, Future Prospects." *Center for Pacific Asia Studies*. Stockholm University.
- Safitri, D., 2013, *Kartu Indonesia dalam Konflik Laut China*, (internet)
 <http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130614_indonesiadefencedynamic.shtml> (Diakses tanggal 20 Januari 2014)
- Siitonen, L., 1990, *Political Theories Of Development Cooperation: A Study Of Theories Of International Cooperation. Wider Working Papers*. World Institute for Development Economics Research of the United Nations University.
- Simamora, P., 2013, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sinaga, L.Ch., 2010, *Memaknai Tahun Persahabatan Indonesia-China*, (Internet)

[www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik internasional/](http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik_internasional/) 324-memaknai-tahun-persahabatanindonesia-cina-> (Diakses tanggal 30 April 2013)

Singarimbun, N. dan Effendi, S., 1995, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Indonesia. Cetakan kedua. Jakarta.

Suara Karya, 2006, *Indonesia-China Rumuskan Kerjasama*. (internet) <<http://www.suarakarya-online.com>>. Jakarta, 14 Mei 2006.

Subarsono, 2005, *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Sudarsono, J., 1995, *Lingkungan Internasional dari Pertahanan-Keamanan Indonesia dalam Ekonomi, Politik dan Strategi*. Gramedia. Jakarta

Sudjatmiko, T., 2011, *Analisa Hubungan Indonesia-China Terkait Keantariksaan*, (Internet) <http://jurnal.lapan.go.id/index.php/berita_dirgantara/article/viewFile/1731/1566>, diakses tanggal 20 Januari 2014

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

<http://pengertianpengertian.blogspot.com/2011/11/pengertian-teknik-sampling-purposive.html>

Sukawarsini Dj., *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. 2008. Graha Ilmu: Yogyakarta. Diunduh dari <https://coretcoretkuliah.wordpress.com/2010/04/01/indonesia-dan-sengketa-kepulauan-spratly/> Diakses 24 Nov 2014

Sukma, R., 1994, "Hubungan Indonesia-Cina: Jalan Panjang Menuju Normalisasi", dalam Bandoro, Bantarto [ed] "*Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*". Jakarta: CSIS

Sumedi, 2015, "Implementasi Kerjasama Pertahanan guna Mewujudkan Kesiagaan Militer". Asisten Perencanaan

Umum (Asrenum) Panglima TNI, *Makalah*, yang disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Istu (mewakili Asrenum) pada FGD tanggal 26 Februari 2015.

Supriyanto, 2011, Radikal (internet) <<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110131191150AAD7896>> (Diakses 10 Februari 2015)

Supriyono, Y., 2011, *Menyimak Keberhasilan China di Antariksa*, (internet) <www.suara-merdeka.com> (Diakses 10 Februari 2015)

Suryadinata, L., 1998, *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto*. Jakarta. LP3ES

Suwitri, S., 2008, "[Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang](#)". *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin*, VI (No 3). 01-32.

Swastanto, Y., 2015, "Implikasi Kebijakan Kerjasama Pertahanan Guna Mewujudkan Kesiapsiagaan Militer". Ditjen Strahan Kemenhan. *Makalah* Disampaikan pada FGD tanggal 26 Februari 2015 di Lemhannas RI. Jakarta

Tellis, A., Bially, J., Layne, C., McPherson, M., Sollinger, J.M., 2000, *Measuring national power in the postindustrial age : analyst's handbook*. Santa Monica, CA.

Tempo Interaktif, *Indonesia-China Teken Kerjasama Pertahanan*. **Error! Hyperlink reference not valid.** Jakarta, 14 Mei 2006.

Tempo Interaktif, *Presiden Harapkan kerjasama Pertahanan dengan China*. **Error! Hyperlink reference not valid.** Jakarta, 27 Juli 2005.

The Japan Foundation, *Jepang-Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan*. (Internet) <<http://www.jpff.or.id/artikel/studi-jepang-pertukaran-intelektual/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-china-selatan>>. Diakses pada Tanggal 19 April 2013.

- Tilaar, H.A.R., dan Nugroho, R., 2005, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tim Redaksi, "Pengerahan Alutsista Tni Untuk Membantu Penanganan Bencana". *Majalah Wira*, Volume 52 / No. 36, Januari-Februari 2015.
- Tiongkok Outpost, 2011, *Sengketa Kepulauan Spratly: Tantangan Bagi Indonesia*. (Internet)
<<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik-internasional/472-sengketa-kepulauan-spratly-tantangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua-asean-2011>.>
(Diakses 19 April, 2013)
- Usman, A., dan Sukma, R., 1997 *Konflik Laut Tiongkok Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, CSIS, Jakarta
- Van Der Kroef, JM, 1969, *The Sino-Indonesian Rupture*, New York: American-Asian Educational Exchange.
- Van Meter, D., dan Van Horn, C., 1975, "The Implementation Process : A Conceptual Framework". Departement of Political Science Ohio State University. *Administration & Society*. Vol. 6 No. 4. February 1975. Sage Publications, Inc. (Downloaded from <http://aas.sagepub.com> at Nanjing University on July 4, 2010)
- Wibisono, A.N., Peningkatan Kapabilitas Militer China Dalam Upaya Menjadi Negara Hegemon di Kawasan Asia. FISIP UI.
- Wibowo, I. dan Hadi, S., 2009, *Merangkul China: Hubungan Indonesia-China Pasca Soeharto*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Wicaksono, A.P., 2009, *Agreement Kerja Sama Pertahanan Indonesia-China 2007*.
- Wijaya, A., *Hubungan Mesra RI-China*. <http://www.ntt-online.org>. Jakarta, 26 Desember 2007.
- Winarno, B., 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Cetakan Pertama Edisi Revisi. Media Pressindo. Yogyakarta.

- Wing, I., 1998, *Defence And The Environment - Definitions And Concepts. Proceedings Regional Asia Pacific Defence Environmental Workshop*. Australian Defence Force Academy.
- Wingarta, P.S., 2015, *Implikasi Kebijakan Kerjasama Pertahanan Guna Mewujudkan Kesiapsiagaan Militer*. Makalah yang disampaikan pada FGD Tanggal 26 Maret 2015. Jakarta
- Yanuaridho, 2012, *PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta)* (Internet) <<https://yanuaridho.wordpress.com/2012/01/29/prri-dan-permesta>> (Diakses 10 Februari 2015)
- Yuanzhi, K., 1999, *Silang Budaya China Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta
- Yusgiantoro, P., 2010, *Pencapaian Pembangunan Pertahanan Keamanan Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka*. *Negarawan*, Jurnal Sekretariat Negara RI No. 17, Agustus 2010.
- Zein, A.B., 2000, *Etnis China Dalam Potret Pembauran di Indonesia*. Prestasi Insan. Jakarta

TENTANG PENULIS

Dr. Agus Purwo Wicaksono

Dr. Agus Purwo Wicaksono, lahir di Lamongan (Jawa Timur) 29 Agustus 1964. Doktor Studi Kebijakan UGM ini, sebelumnya menyelesaikan *Master of Art* Hubungan Internasional UGM, Magister Manajemen dan Sarjana Manajemen. Dia mengabdikan diri di Lemhannas RI sejak tahun 2007 hingga saat ini, melalui TNI AU yang didedikasikan sejak tahun 1987.

Karier intelektualnya dimulai semenjak sering mengikuti berbagai seminar, simposium, lokakarya, kelompok kerja dan studi strategis baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kualitas kecendekiawanannya semakin terasah terutama semenjak masuk Kedeputusan Pengkajian Strategis Lemhannas RI, Tim Pengkaji Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Tim Pengkaji Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (DAS-BIN), dan Tim Pengkaji Komnas Perempuan.

Saat ini Penulis aktif dalam berbagai Kajian Kebijakan Strategis bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya, Hankam, Manajemen, dan *Scenario Planning*. Disamping aktif sebagai Tutor Pembimbing Peserta/ Siswa Lemhannas, Penulis juga aktif sebagai narasumber Wawasan Kebangsaan (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan BII), Strategi Nasional, Kewaspadaan Nasional, Kebijakan Publik, Kepemimpinan Transformasional (Making Indonesia 4.0), Penganggaran, Reformasi Birokrasi, maupun Pengadaan Barang dan Jasa.

Dr. Agus Purwo Wicaksono dapat dikontak melalui email aguspurwodr@gmail.com